



**RANCANGAN RENCANA KERJA
(RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

TAHUN
2027

SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Paser
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 01, Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur 78251
Laman <http://www.paserkab.go.id>, Post - el humas.kab.paser@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR : 500.14.2.1/620/PK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2027

SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang : a . Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa agar proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah berjalan terpadu, terarah, dan tepat waktu, perlu ditunjuk personel yang bertanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1. Mengumpulkan data dan informasi terkait capaian kinerja tahun sebelumnya;
 2. Menyusun rancangan Renja yang selaras dengan RPJMD dan Renstra Setda;
 3. Melaksanakan penginputan data ke dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
 4. Mengoordinasikan usulan program/kegiatan dari setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditempuhnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser melalui DPA Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada Tanggal : 07 Januari 2026



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
Pempina Utama Madya
Nip. 196612111986091002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 500.14.2.1/820/pk/2026

TANGGAL : 07 Januari 2026

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2027**



No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktural / Fungsional
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
2	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Paser
3	Ketua	Zuhairina, SH, MM (Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
4	Sekretaris	Ruslinawati, SE, M.Si (Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
5	Anggota	Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
6	Anggota	Nurmalia Rasyida, SP (Penelaah teknis kebijakan pada Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
7	Anggota	Anwar, SE Perencana ahli pertama (pada Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
8	Anggota	Siti Zubaedah, SE Perencana ahli pertama Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
9	Anggota	Selamet Riyadi. SR Administrasi pada bagian perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip.198612111986091002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Renja Tahun 2027 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Periode 2025-2029. Sebagai tahun ketiga dalam implementasi Renstra, tahun 2027 menjadi momentum krusial untuk memastikan akselerasi pencapaian target-target kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan pelayanan administratif.

Penyusunan Rancangan ini dilakukan dengan memperhatikan evaluasi hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya serta menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Fokus utama Sekretariat Daerah pada tahun 2027 diarahkan pada:

1. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan** yang akuntabel dan berbasis digital.
2. **Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah** dalam mendukung program unggulan Kepala Daerah.
3. **Optimalisasi Pelayanan Administratif** dan sarana prasarana penunjang tugas pokok fungsi pemerintahan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta dukungan dari pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dalam forum Konsultasi Publik sangat kami harapkan untuk menyempurnakan dokumen ini menjadi Rencana Kerja yang aplikatif dan akuntabel.

Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Tana Paser, 2026
Sekretaris Daerah

Drs. Katsul Wijaya, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	6
2.2 ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	28
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	58
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	59
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	79
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	80
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	80
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	81
3.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	98
BAB V PENUTUP	103

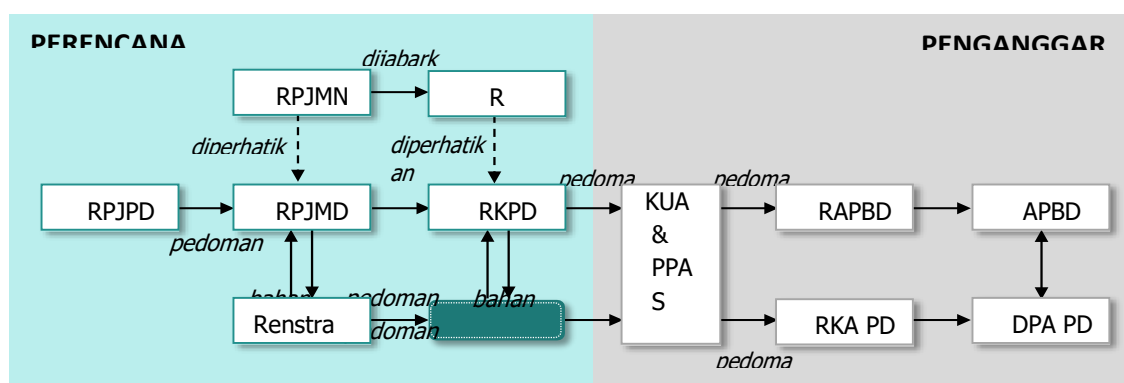
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rancangan Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Rancangan Rencana Kerja (RENJA) disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Penyusunan Rancangan (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2027. Dimana penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2025.

Selanjutnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja PD Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 sebagai berikut:

lain:

- 1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 422);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 5) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun harus dilakukan seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025-2029, sehingga pada penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2027 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan **3 program, 18 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja**

sedangkan yang **tidak memenuhi target kinerja terdapat 5 kegiatan**. Secara rinci diuraikan sebagai berikut evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja" dengan target tahun 2025 sebesar 100%, realisasi sebesar 100%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100% dan 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 116,89%. Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 4 (empat) Sub Kegiatan telah mencapai 78,73%, 188,83%, 100% dan 100%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 2 (dua) Sub Kegiatan telah mencapai 100 %, dan 100,00%..

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 70,74%. Pada kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) Sub Kegiatan, dimana target indikator kinerja dari 8 (delapan) Sub Kegiatan telah mencapai 56,25%, 141,18%, 80%, 26,67%, 44,44%, 46,67%, dan 100%.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi" dengan target

tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 164,44%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 125%, 260%, dan 108,33%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Pemeliharaan BMD" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 306,11%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 366,67%, 85%, dan 466,67%.

7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 88,31%. Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 4 (Empat) Sub Kegiatan telah mencapai 110%, 25%, 85,71% dan 133,33%.

8. Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 88,89%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 116,67%, 100 % dan 50%.

9. Penataan Organisasi

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 5 (lima) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100%, 100%, 100% dan 100%.

10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan" dengan target tahun 2025

sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100% dan 100%.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Administrasi Tata Pemerintahan

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100% dan 100%.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 57,85%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 50,56 %, 63 % dan 60 %.

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 196,34%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 122,35%, 366,67% dan 100%.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 104%. Pada kegiatan ini terdapat 2 (Dua) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 2 (Dua) Sub Kegiatan telah mencapai 108% dan 100%.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi" dengan target tahun 2025

sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 4 (empat) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100%, 100% dan 100%.

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100% dan 100%.

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Hasil Proses PBJ" dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 129,77%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 185,30%, 104% dan 100%

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 99,26%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 97,78%, 100% dan 100%.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun lalu (tahun n-2/tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/tahun 2025) adalah sebagaimana Tabel T-C.29. berikut:

TABEL T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
s/d TAHUN 2026 KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	50,89					50,89	294,07	294,07
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	100		100			100	300	300
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	8	8	8	100	8	16	200
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	9	9	9	100	6	18	300
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	3	3	3	100	3	6	200
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	85		100			85	318,49	318,49
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	905	750	850	1040	113,33	905	1790	197,79
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	4	3	11	75	3	15	500,00

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	168	100	100	100	100	168	200	119,05
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	80		100			80	301,93	301,93
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	93	357	180	91	50,42	93	448	481,72
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	35	100	100	63	100	35	163	465,71
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	25	15	15	9	100	25	24	96
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50		100			50	235,33	392,22
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MoU Kerja sama Dalam Negeri yang terlaksanakan	25	25	25	27	100	25	52	208
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah MoU yang telah dievaluasi pada Pelaksanaan Kerjasama	15	12	12	12	100	15	24	160

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
4.01.03.2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan	85					85	310,42	310,42
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	70					70	412,48	412,48
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	5,5					5,5		
		Tingkat Kematangan UKPBJ	40					40		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	2200	2300	4262	104,55	12	6462	53850
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	247	250	260	101,21	12	507	4225
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	12	20	20	166,67	20	32	160
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.	85					85	286,04	286,04
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8	24	24	24	100	8	48	600
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	48	36	36	75	12	84	700
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12	32	24	24	75	12	56	466,67
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	30	12	12	40	1	42	4200
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	25				#DIV/0!	25	0	0

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatn dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
	Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Evaluasi Pelaksaasaan Tugas TPAKD								
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100					100	300	300
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	2	2	2	100	12	4	33,33
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	12	12	12	100	12	24	200
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	12	12	100	12	24	200
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun	3					3	301,67	301,67
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	16	40	45	44	112,5	16	84	525
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12	35	37	37	105,71	12	72	600
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	13	40	40	40	100	13	80	615,38

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	76					76	226,38	297,87
4.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	75					75	300	300
		Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	80					80		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	9	9	150	6	15	250
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	12	12	12	100	4	24	600
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	5	12	12	240	4	17	425
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0			#DIV/0!	4	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12	0			#DIV/0!	12	0	0
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase temuan ditindaklanjuti	85					85	298,82	298,82
		Persentase LHP nihil	20					20		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4270	2.268	4284	3373	188,89	4270	5641	132,11
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	800	967	725	1369	74,97	800	2336	292

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	2	2	100	1	4	400
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	100	12	24	200
4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	90		100			90	341,05	341,05
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	28	28	24	100	28	52	185,71
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	8	10	11	125	2	19	950
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	1	8	2	800	8	3	37,5
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	12	12	16	100	24	28	116,67
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	90		100			90	222,36	222,36
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17	100	12	12	12	17	112	658,82
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	180	180	180	180	100	180	360	200

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
	Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran	85		100			85	281,08	281,08
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16	16	9	100	1	25	2500
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	17	17	24	100	1	41	4100
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	25	25	20	100	4	45	1125
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	30	30	8	100	2	38	1900
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	9	9	4	100	1	13	1300
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	150	150	70	100	12	220	1833,333333
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	150	12	12	8	12	162	1350
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12			0	12	12	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	85		100			85	275	275
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	15	100	12	27	225
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	5	5	13	100	12	18	150
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12	12	13	100	12	25	208,33

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
		Kantor yang Disediakan								
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	75		100			75	421,11	421,11
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	3	11	100	3	14	466,67
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	20	17	100	20	37	185
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	3	3	14	100	20	17	85
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	85		100			85	297,22	297,22
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	12	14	100	12	26	216,67
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	24	200
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	12	12	6	100	12	18	150
4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100		100			100	296,86	296,86
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	41	12	12	29,27	12	53	441,67

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7	12=10/4x10
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8	4	7	7	175	8	11	137,5
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6	2	2	2	100	6	4	66,67
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	1	2	2	200	4	3	75
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8	3	3	3	100	8	6	75
4.01.01.2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana	85					85	300	300
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan/acara yang terlaksana	12	12	12	12	100	12	24	200
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12	12	12	100	12	24	200
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan	12	12	12	12	100	12	24	200

Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran murni dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 193.274.133.768 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp. 178.585.218.582,40 atau 92,40%, dengan sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp 14.688.915.286,- Adapun rincian realisasi anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	193.274.133.768	178.585.218.482	92,40%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	48.335.617.244	45.601.719.407	94,34%
Bagian Tata Pemerintahan			
Administrasi Tata Pemerintahan	4.087.549.096	4.020.755.106	98,37%
Penataan Administrasi Pemerintahan	1.993.939.180	1.990.296.884	99,82%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	591.303.175	586.314.194	99,16%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.502.306.741	1.444.144.028	96,13%
Bagian Hukum			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.271.372.590	3.151.258.533	96,33%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	583.166.634	569.294.292	97,62%
Fasilitasi Bantuan Hukum	2.431.135.984	2.325.751.656	95,67%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	257.069.972	256.212.585	99,67%
Bagian Kesejahteraan Rakyat			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.216.127.323	37.675.642.594	93,68%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.766.531.597	30.369.766.250	92,69%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7.195.484.105	7.110.874.344	98,82%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	254.111.621	195.002.000	76,74%
Bagian Kerjasama			
Fasilitasi Kerjasama Daerah	760.568.235	754.063.174	99,14%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	419.265.000	413.419.000	98,61%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	341.303.235	340.644.174	99,81%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.418.242.622	5.894.916.018	91,85%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.030.975.560	2.786.909.301	91,95%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	888.432.648	859.223.057	96,71%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1.225.578.397	1.089.932.707	88,93%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	916.964.515	837.753.537	91,36%
Bagian Perekonomian			
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.002.057.691	997.801.582	99,58%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	304.872.708	304.662.000	99,93%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	363.066.000	359.152.890	98,92%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	302.171.031	302.038.740	99,96%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Mikro kecil			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	31.947.952	31.947.952	100,00%
Bagian Administrasi Pembangunan			
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	993.461.644	854.867.446	86,05%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	311.438.830	286.923.100	92,13%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	340.666.592	280.171.406	82,24%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	341.356.222	287.772.940	84,30%
Bagian Sumber Daya Alam			
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.391.747.727	1.255.337.689	90,20%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	722.793.790	595.374.694	82,37%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	275.262.000	274.481.869	99,72%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	393.691.937	385.481.126	97,91%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.520.273.902	127.088.583.057	91,75%
Bagian Organisasi			
Penataan Organisasi	1.555.961.240	1.437.970.327	92,42%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	696.111.541	675.114.490	96,98%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	319.797.000	261.367.768	81,73%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	378.741.699	352.121.479	92,97%
Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	48.712.000	43.207.600	88,70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	112.599.000	106.158.990	94,28%
Bagian Umum			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	995.240.000	910.289.512	91,46%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	584.240.000	559.710.095	95,80%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	411.000.000	350.579.417	85,30%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.613.116.514	28.069.520.233	91,69%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177.285.542	162.377.800	91,59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.306.279.028	9.376.324.670	90,98%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.100.000.000	976.088.089	88,74%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	582.027.552	517.496.850	88,91%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.094.930	84.855.000	99,72%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.802.218.465	11.772.097.917	91,95%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.560.210.997	5.180.279.907	93,17%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.066.468.395	28.422.613.849	91,49%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.723.157.699	3.470.797.098	60,64%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.654.416.940	15.271.906.751	97,56%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.688.893.756	9.679.910.000	99,91%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.699.150.600	15.000.025.681	95,55%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	948.735.600	755.691.450	79,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.258.128.950	1.082.734.420	86,06%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.492.286.050	13.161.599.811	97,55%
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.745.677.960	5.065.139.005	88,16%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.654.410.650	2.183.555.243	82,26%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.491.267.310	2.374.667.142	95,32%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	600.000.000	506.916.620	84,49%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.531.676.000	960.541.032	62,71%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.231.676.000	933.104.800	75,76%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	27.436.232	9,15%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.484.011.895	5.473.952.638	99,82%
Fasilitasi Keprotokolan	2.743.837.783	2.743.089.300	99,97%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.451.194.013	1.449.001.500	99,85%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.288.980.099	1.281.861.838	99,45%
Bagian Perencanaan dan Keuangan			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	809.265.822	799.135.559	98,75%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	630.532.601	625.022.359	99,13%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	92.843.692	90.206.900	97,16%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.889.529	83.906.300	97,69%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.012.239.788	40.125.243.050	91,17%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.949.301.742	39.176.382.633	91,22%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	865.746.806	753.201.668	87,00%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.038.051	22.742.835	98,72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	174.153.189	172.915.914	99,29%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.007.465.688	824.152.171	81,80%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	407.465.688	224.152.171	55,01%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	100,00%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat Daerah

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi Pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

1.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1.1 Bagian Tata Pemerintahan

- (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan

sosial dan kesejahteraan masyarakat. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1.3 Bagian Hukum

- (1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1.4 Bagian Kerjasama

- (1) Bagian Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri, dan evaluasi kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri, dan evaluasi kerja sama;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
 - c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2.1 Bagian Perekonomian

- (1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Usaha Milik Daerah dan Sadan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2.2 Bagian Administrasi Pembangunan

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2.3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - (2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3.1 (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. menyusun dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4 Bagian Sumber Daya Alam

- (1) Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Sumber daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

- d. terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3 Asisten Administrasi Umum

- (1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3.1 Bagian Umum

- (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3.2 Bagian Organisasi

- (1) Bagian Organisasi dipimpin berkedudukan di bawah dan Administrasi Umum.
- (2) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis (1) jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3.3 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
 - (2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3.1 (1) Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (2) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. melaksanakan penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan

- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4 Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.5 Penyetaraan Jabatan

- (1) Subkoordinator Jabatan Fungsional merupakan jabatan pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional.

- (2) Subkoordinator Jabatan Fungsional diberikan kegiatan tugas dan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dalam jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6 STAF AHLI

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;
 - b. mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan ditingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi serta mengacu pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun 2025. Terdapat lima indikator utama yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

1. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan
2. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan
3. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan
4. Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah
5. Indeks kepuasan layanan administrasi umum

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat

Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nilai Kinerja Sekretariat Daerah				62,76	64,33	65,64	67,58	69,27			65,64	67,58	
Nilai Kinerja Manajemen Internal				76	80	84	87	90			84	87	
Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah				85	88	90	93	95			90	93	
Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah				80	85	90	93	95			90	93	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok			6	6	6	6	6			6	6	
Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dok			4	4	4	4	4			4	4	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			4	4	4	4	4			4	4	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			4	4	4	4	4			4	4	
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Persentase temuan ditindaklanjuti				85	88	91	94	96			91	94	
Persentase LHP nihil				20	25	30	35	40			30	35	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln			4270	4270	4270	4270	4270			4270	4270	
Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			800	800	800	800	800			800	800	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			1	1	1	1	1			1	1	
Jumlah Laporan Keuangan	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani				90	92	94	96	98			94	96	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok			17	17	17	17	17			17	17	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			180	180	180	180	180			180	180	
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				85	88	90	93	95			90	93	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	1	1	1			1	1	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	1	1	1			1	1	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			4	4	4	4	4			4	4	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	1	1	1			1	1	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	2	2	2	2			2	2	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok			12	12	12	12	12			12	12	
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi				85	88	90	93	95			90	93	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik				75	78	82	86	90			82	86	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			3	3	3	3	3			3	3	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			20	20	20	20	20			20	20	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			20	20	20	20	20			20	20	
Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan				90	92	94	96	98			94	96	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan			28	28	28	28	28			28	28	
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket			2	2	2	2	2			2	2	
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang			8	8	8	8	8			8	8	
Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan			24	24	24	24	24			24	24	
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				85	87	89	91	93			89	91	
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket			12	12	12	12	12			12	12	

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket			12	12	12	12	12			12	12	
Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah				100	100	100	100	100			100	100	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan			8	8	8	8	8			8	8	
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen			6	6	6	6	6			6	6	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen			4	4	4	4	4			4	4	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen			8	8	8	8	8			8	8	
Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana				85	88	90	92	95			90	92	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Nilai LPPD				2,78	2,99	3,21	3,43	3,65			3,21	3,43	
Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				50,89	51,91	52,95	54,01	55,09			52,95	54,01	
Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah				100	100	100	100	100			100	100	
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen			8	8	8	8	8			8	8	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen			6	6	6	6	6			6	6	

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Kewilayahan													
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen			3	3	3	3	3			3	3	
Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja				80	85	90	95	100			90	95	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen			93	93	93	93	93			93	93	
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen			35	35	35	35	35			35	35	
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen			25	25	25	25	25			25	25	
Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana				85	88	90	93	95			90	93	
Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen			905	905	905	905	905			905	905	
Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus			3	3	3	3	3			3	3	
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen			168	168	168	168	168			168	168	
Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				50	54	54	56	60			54	56	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja	Dokumen			25	25	25	25	25			25	25	

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sama Dalam Negeri													
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan				20	21,4	22,9	24,5	26,2			22,9	24,5	
Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.				85	88	90	92	95			90	92	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen			1	1	1	1	1			1	1	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksaaan Tugas TPAKD	Dokumen			25	25	25	25	25			25	25	
Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu				100	100	100	100	100			100	100	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan			12	12	12	12	12			12	12	
Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik				70	75	80	85	90			80	85	
Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ				5,5	6	6,5	7	7,5			6,5	7	

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tingkat Kematangan UKPBJ				40	42	44	46	48			44	46	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang			20	20	20	20	20			20	20	
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun				3	3	3	3	3			3	3	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen			16	16	16	17	16			16	17	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen			12	12	12	12	12			12	12	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen			12	12	12	12	12			12	12	
			Pemanfaatan Sistem Pengadaan	23,5	26	28	30	30			23,5	26	
			Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	10	15	20	25	30			10	15	
			Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	40	40	40			40	40	

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	70	75	78	80	82			70	75	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, yaitu diantaranya :

1. Penyelenggaran Pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip – prinsip Good Governance;
2. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah;
3. Pemantaun dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan Administratif dan Aparatur Pemerintah Daerah;
5. Optimalisasi Kapasitas dan kualitas Pelayanan Aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah;

Sementara itu, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, diantaranya yaitu :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkositensi perencanaan pembangunan dan mekanisme pendanaan daerah;
2. Terdapatnya kegiatan – kegiatan yang masih tumpang tindih antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser;
3. Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan keahliannya

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan

RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2027
KABUPATEN PASER

Rencana Rkpd						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser				
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Paser	Nilai Kinerja Manajemen Internal	N/A	80	82.030.279.177	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Paser	Nilai Kinerja Manajemen Internal	N/A	80	82.030.279.177
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser				
	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	Paser	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	n/a	88	1.129.512.164	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	Paser	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	n/a	88	1.129.512.164
			Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah		85				Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah		85	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	609.478.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	609.478.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Paser	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	12	4	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Paser	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	12	4	75.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	4	142.516.882	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	4	142.516.882
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	4	160.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	4	160.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	12	142.516.882	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang	0	12	142.516.882

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Rencana Rkpd						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Selain Renstra PD dan Renja PD						Selain Renstra PD dan Renja PD		disusun			
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan	Paser	Persentase temuan ditindaklanjuti	n/a	88	45.444.081.178	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan	Paser	Persentase temuan ditindaklanjuti	n/a	88	45.444.081.178
			Persentase LHP nihil		25				Persentase LHP nihil		25	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268	4270	44.081.136.158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268	4270	44.081.136.158
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	725	800	988.685.820	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	725	800	988.685.820
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	45.066.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	45.066.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	12	329.192.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	12	329.192.800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser				
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	Paser	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	n/a	92	776.000.000	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	Paser	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	n/a	92	776.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	17	365.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	17	365.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	180	411.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	180	411.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser				
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Paser	Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran	n/a	88	10.928.809.046	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Paser	Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran	n/a	88	10.928.809.046
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	16	1	87.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	16	1	87.000.000

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	/Penerangan Bangunan Kantor		Disediakan				/Penerangan Bangunan Kantor		Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	1	2.650.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	1	2.650.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	4	850.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	4	850.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	1	280.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	1	280.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	2	47.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	2	47.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	12	4.677.187.550	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	12	4.677.187.550
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	12	2.252.621.496	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	12	2.252.621.496
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	85.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser				
	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang Sekretariat Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	n/a	88	8.315.867.420	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang Sekretariat Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	n/a	88	8.315.867.420
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	2.256.330.040	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	2.256.330.040
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	12	3.059.537.380	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	12	3.059.537.380
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5	12	3.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5	12	3.000.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser				
	Meningkatnya barang	Paser	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	n/a	78	4.352.274.200	Meningkatnya barang	Paser	Persentase barang milik daerah dalam	n/a	78	4.352.274.200

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	inventaris dalam kondisi baik						inventaris dalam kondisi baik		kondisi baik			00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	740.072.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	740.072.100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	1.168.165.460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	1.168.165.460
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	20	2.444.036.640	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	20	2.444.036.640
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser				
	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah	Paser	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	n/a	92	2.321.936.000	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah	Paser	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	n/a	92	2.321.936.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	28	300.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	28	300.000.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	2	1.121.936.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	2	1.121.936.000
	Pelaksanaan Medical	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	8	8	300.000.000	Pelaksanaan Medical	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical	8	8	300.000.000

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	
	Check UpKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Check UpKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			0	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		24	24	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	24	600.000.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paser					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paser					
	Tersedianya layanan dukungan operasional dan fasilitas rumah tangga yang efektif, efisien, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah	Paser	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Tersedianya layanan dukungan operasional dan fasilitas rumah tangga yang efektif, efisien, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah	Paser	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				
			n/a		87	3.049.477.000			n/a		87	3.049.477.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12	12	1.343.700.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	1.343.700.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12	12	1.105.777.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	1.105.777.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		12	12	600.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	12	600.000.000
	Penataan Organisasi	Paser					Penataan Organisasi	Paser					
	Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah	Paser	Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah		100	100	1.419.217.839	Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah	Paser	Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100	100	1.419.217.839
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		N/A	12	405.830.541	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	N/A	12	405.830.541
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		N/A	8	508.766.730	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	N/A	8	508.766.730
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Paser	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		N/A	6	215.097.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Paser	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	N/A	6	215.097.000
	Monitoring,Evaluasi dan	Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan		N/A	4	79.853.000	Monitoring,Evaluasi dan	Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	N/A	4	79.853.000

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	
	Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		A		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		N/A	8	209.670.568	Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		N/ A	8	209.670.568
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Paser					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Paser					
	Terselenggaranya layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, tepat waktu, dan mendukung kelancaran tugas serta citra pimpinan daerah	Paser	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana		n/a	88	4.293.104.330	Paser	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana		n/a	88	4.293.104.330
	Fasilitasi Keprotokolan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12	12	2.098.885.566	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12	12	2.098.885.566
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		36	12	1.098.388.026	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		36	12	1.098.388.026
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12	12	1.095.830.738	Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12	12	1.095.830.738
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser					
	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat	Paser	Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		N/A	51,91	20.650.365.651,00	Paser	Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		N/ A	51,91	20.650.365.651,00
	Administrasi Tata Pemerintahan	Paser					Administrasi Tata Pemerintahan	Paser					
	Meningkatnya Kinerja	Paser	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan		100	100	1.862.310.191,00	Paser	Persentase Layanan Administrasi		100	100	1.862.310,1

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	layanan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi		Daerah				layanan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi		Pemerintahan Daerah			91,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	23	8	883.223.960,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	23	8	883.223.960,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	6	432.739.309,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	6	432.739.309,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	3	546.346.922,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	3	546.346.922,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Paser					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Paser				
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat	Paser	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	n/a	85	17.438.176.382,00	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat	Paser	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	n/a	85	17.438.176.382,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	93	15.531.796.016,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	93	15.531.796.016,00

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	35	1.454.800.945,00	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	35	1.454.800.945,00

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15	25	451.579.421,00	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15	25	451.579.421,00

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Paser					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Paser				
	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi hukum yang efektif dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah daerah	Paser	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	N/A	88	911.369.609,00	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi hukum yang efektif dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah daerah	Paser	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	N/A	88	911.369.609,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	765	905	302.401.748,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	765	905	302.401.748,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	3	429.604.341,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	3	429.604.341,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	866	168	179.363.520,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	866	168	179.363.520,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Paser					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Paser				
	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan daerah	Paser	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	54	438.509.469	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan daerah	Paser	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	54	438.509.469
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8	25	289.765.000	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8	25	289.765.000
	Evaluasi Kerjasama	Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	8	12	148.744.469	Evaluasi Kerjasama	Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	8	12	148.744.469
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser				
	Meningkatnya tatakelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, teritegrasi,inklusif	Paser	Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	21,4	4.893.673.131,00	Meningkatnya tatakelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, teritegrasi,inklusif	Paser	Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	21,4	4.893.673.131,00

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	dan berkelanjutan						dan berkelanjutan					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Paser					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Paser				
	Terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Paser	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.	n/a	88	935.184.914,00	Terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Paser	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.	n/a	88	935.184.914,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20	12	256.558.634	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20	12	256.558.634
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42	12	253.679.515	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42	12	253.679.515
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20	12	253.680.125	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20	12	253.680.125
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	25	1	85.633.320	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	25	1	85.633.320
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD		25	85.633.320	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD		25	85.633.320
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Paser					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Paser				
	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat waktu dan terintegrasi	Paser	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100	100	701.208.099,00	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat waktu dan terintegrasi	Paser	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100	100	701.208.099,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	12	301.924.340	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	12	301.924.340
	Pengendalian dan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	12	12	303.119.159	Pengendalian dan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	12	12	303.119.159

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Evaluasi Program Pembangunan		Program Pembangunan				Evaluasi Program Pembangunan		Evaluasi Program Pembangunan			9
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	96.164.600	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	96.164.600
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser				
	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	Paser	Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	n/a	75	2.528.816.625,00	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	Paser	Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	n/a	75	2.528.816.625,00
Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ			5	6	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ				5	6		
Tingkat Kematangan UKPBJ			n/a	42	Tingkat Kematangan UKPBJ				n/a	42		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1667	12	745.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1667	12	745.000.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	240	12	1.067.521.746	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	240	12	1.067.521.746
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	A/N	20	716.294.879	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	A/N	20	716.294.879
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Paser					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Paser				
	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun	n/a	3	728.463.493,00	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun	n/a	3	728.463.493,00

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,Kelautan,dan Perikanan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 30	16	231.177.640	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,Kelautan,dan Perikanan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 30	16	231.177.640

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	25	12	219.901.980	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	25	12	219.901.980

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Rencana Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Pagu Indikatif Tahun 2027 (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan, Sub Kegiatan		Target Capaian 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027 (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Prtanahan	30	12	277.383.873	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	30	12	277.383.873

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2027 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2026, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangin berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi ini diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis saja atau Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah, sedangkan untuk Sekretariat Daerah tidak terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan tidak menampung aspirasi dari masyarakat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai unsur staf, dan termasuk dalam urusan penunjang pemerintah serta berperan sebagai middle line dan supporting staff yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan membantu dalam rangka penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pembinaan Kepegawaian ASN dan pelayanan administratif.

Pada tahun 2027, tidak ada usulan masyarakat yang diakomodir oleh Sekretariat Daerah kabupaten Paser. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tabel TC.3.2
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2027 dari
Pemangku Kepentingan kabupaten

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT		Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja		
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.000.000	Pengadaan Sound system Untuk Komunitas FORSADAP (Forum Solidaritas Driver Ambulans Paser)
2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Desa Bukit Seloka Kec. Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina	500.000.000	Permohonan Bantuan Dana Hibah Yayasan

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Spiritual		Mental Spiritual		DIPASANA
3	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Desa Senaken	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	200.000.000	bantuan Pembangunan Pagar Pondok Pesantren Al Ihsan
4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	JL. Kandilo Bahari, Gg. Reformasi 4, RT. 01 Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	56.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah yayasan Mahad Al - Ilmi
5	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	RT 7 Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong , Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Taman Pendidikan Alquran
1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA)
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Blok D Sawit Jaya Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Al Muttaqin

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Krayan Jaya Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Istigizah Laranja
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tajer Mulya Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim A'Taqwa

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Pengendalian Penduduk dan KB		
5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tiwei Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Muslimat
6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tajer Mulya Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Muslimat

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tajer Mulya Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim LDII
8	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 11 Desa Sawit Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Nurul Hikmah
9	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Muara Adang II Kecamatan Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Al Barokah

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
10	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tiwei	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Al Hikmah
11	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Keladen Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	100.000.000	Permohonan Rehabilitasi /Perbaikan Masjid Ar Raudah

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
12	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Krayan Bahagia RT.05 Kec. long Ikis, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	50.000.000	Peningkatan Pembangunan Musholla Al - Hikmah
13	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Krayan Bahagia RT,05 Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	50.000.000	Perluasan Pembangunan Musholla Al Hidayah

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	desa Kayungo Sari	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	50.000.000	rehab gerja SANTA MARIA IMMACULLATA
15	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jalan sultan hasanuddin kec tanah grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	50.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah kelompok majelis taklim ASMAUL HUSNA

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
16	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa senaken rt 10 kec tanah grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	50.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah kelompok majelis taklim AR RAUDAH
17	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	kec tanah grogot	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah gereja katolik Paroki Alleluia
18	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	rt 02 desa rantau panjangn kec tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	50.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah majelis taklim RIYADUL JANNAH

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
19	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	JL. Gajah Mada, RT.03 RW 03, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	700.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah
20	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 06 Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	100.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Mushola Baitul Kuduss

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
21	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Masjid At-Taqwa
22	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 02, Desa Pepara, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Masjid Nuruddaraini,

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
23	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 01, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Masjid Raudha.
24	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Olong Pinang,Kecamatan Pasir Belengkong , Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200.000.000	Lanjutan Pembangunan Masjid,Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah,Masjid Nurul Amal

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
25	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT 7 Desa Suatang TSM Kecamatan Paser Belengkong , Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200.000.000	Lanjutan Pembangunan Masjid,Bantuan Sarana Rumah Ibadah,
26	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT 4 Desa Seniung Jaya Kecamatan Pasir Belengkong, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200.000.000	Lanjutan Pembangunan Masjid,Bantuan Sarana Rumah Ibadah,

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
27	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Mengkudu Kecamatan Batu Engau, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah, Mushola Nurul Iman
28	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Musholah Al-Baqarah
		JUMLAH		3.766.000.000	JUMLAH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Sembilan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Permasalahan pelayanan tugas dan fungsi sekretariat daerah Kabupaten Paser memiliki relevansi yang kuat dengan misi-misi Kementerian Dalam Negeri. **Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi**

Telah ditetapkan Visi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu: **“KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS”** Visi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan kedalam enam misi yakni :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan sejahtera
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Professional dan berintegrasi Berbasis teknologi informasi.

5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal.

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 mengusung Visi **“TANGGUH, UNGGUL TRANSPORMATIF ADIL DAN SEJAHTERA”**. Selanjutnya dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Pemerintah Kabupaten Paser 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif
2. Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif Sejahtera, unggul dan berdaya saing disasari nilai-nilai keagamaan yang kuat
3. Memantapkan ketahanan social budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, Masyarakat, Pembangunan karakter dan lingkungan
4. Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya local
5. Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan **Pembangunan**.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator utama pembangunan daerah sekaligus mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan pemetaan isu strategis yang selaras dengan fungsi, tugas, dan peran Sekretariat Daerah. Dari tiga kelompok sasaran prioritas pembangunan, terdapat beberapa isu yang secara langsung melibatkan peran strategis Sekretariat Daerah, yaitu:

1. **Kelompok Prioritas 1** Terdapat **6 isu utama**, dan **Sekretariat Daerah berkontribusi langsung pada dua isu**:

- o **Isu 2: *Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran***

Sekretariat Daerah memiliki peran dalam koordinasi lintas OPD, harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan, serta fasilitasi kerja sama antar daerah dan pemangku kepentingan.

- o **Isu 6: *Penguatan Smart and Good Governance***

Sebagai pusat koordinasi pemerintahan, Setda berperan penting dalam mendorong penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan.

2. Kelompok Prioritas 2 Terdiri dari 5 isu, namun tidak ada isu yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
3. Kelompok Prioritas 3 Dari 3 isu prioritas dalam kelompok ini, Sekretariat Daerah terkait pada isu ke-2, yaitu:

Isu 2: ***Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi*** Sekretariat Daerah berperan dalam koordinasi kebijakan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, fasilitasi kerja sama antar daerah dan sektor swasta, serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Melalui perannya sebagai pusat koordinasi, fasilitasi kebijakan, dan pengelolaan kerja sama lintas sektor, Sekretariat Daerah menjadi aktor kunci dalam memastikan sinergi antar program pembangunan dan pemenuhan indikator kinerja daerah yang terukur dan berkelanjutan.

Tabel. 2.11
Tema Isu KLHS Kabupaten Paser

Kelompok Sasaran Prioritas	Isu Prioritas	Peran Sekretariat Daerah	Indikator Terkait	TPB Terkait
Kelompok 1	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Koordinasi lintas OPD terkait program pengentasan kemiskinan	Persentase penduduk miskin	TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)
		Fasilitasi kemitraan & CSR	Tingkat pengangguran terbuka	TPB 8 (Pekerjaan Layak)
		Harmonisasi kebijakan antar sektor		
	Penguatan Smart and Good Governance	Implementasi SPBE	Indeks SPBE	TPB 16 (Institusi yang Kuat)
		Penguatan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	
		Tata kelola pemerintahan terbuka dan partisipatif	Nilai SAKIP	
Kelompok 2	Isu – Tidak terkait langsung dengan Setda)	–	–	–
Kelompok 3	2. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Koordinasi lintas OPD dan pelaku usaha	Laju pertumbuhan ekonomi daerah	TPB 8 (Pertumbuhan Ekonomi Inklusif)
		Fasilitasi penyusunan regulasi investasi	Nilai investasi masuk	
		Promosi daerah		

Dalam rangka percepatan pencapaian **indikator utama daerah** dan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**, peran Sekretariat Daerah menjadi strategis sebagai pusat koordinasi pemerintahan, fasilitasi kebijakan lintas OPD, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Dari tiga kelompok isu prioritas, Setda berperan dalam:

Isu 2 (Kelompok 1): Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Tantangan	Peluang
Kurangnya integrasi program antar OPD	Dukungan regulasi nasional & TPB yang mendorong kolaborasi lintas sektor
Data kemiskinan dan pengangguran belum akurat dan real-time	Pemanfaatan teknologi digital dan big data melalui SPBE

Masih terbatasnya peran sektor swasta dan CSR dalam penanggulangan kemiskinan	Potensi kerja sama dengan dunia usaha, BUMD, dan LSM melalui skema kemitraan
Kesenjangan wilayah dalam akses program pemberdayaan	Peluang penguatan perencanaan partisipatif berbasis desa dan kelurahan

Isu 6 (Kelompok 1): Smart & Good Governance

Tantangan	Peluang
Rendahnya literasi digital ASN dan resistensi terhadap perubahan	Dukungan program nasional SPBE dan transformasi digital pemerintahan
Integrasi data dan layanan masih terfragmentasi	Potensi penggunaan sistem informasi terintegrasi antar OPD
Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi kinerja	Peluang memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan akuntabilitas publik melalui e-Monev
Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah	Dukungan TIK dan anggaran dari pemerintah pusat dan CSR sektor teknologi

Isu 2 (Kelompok 3): Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Tantangan	Peluang
Proses perizinan yang masih lambat dan tumpang tindih	Implementasi OSS (Online Single Submission) dan reformasi perizinan daerah
Lemahnya promosi potensi daerah	Peluang pemanfaatan media digital, website, dan kerja sama daerah untuk promosi investasi
Keterbatasan insentif bagi investor	Regulasi daerah yang mendukung kemudahan berusaha dan kemitraan lokal
Kurangnya sinergi antara sektor ekonomi daerah	Koordinasi lintas sektor dan kerja sama antar wilayah melalui fasilitasi Sekda

1. Hasil Analisis Terhadap KLHS

Untuk Sekretariat Daerah ada 2 isu yang terkait KLHS yaitu :

- Isu Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Isu strategis Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran memiliki keterkaitan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebanyak 24 indikator. Indikator yang memiliki keterkaitan dengan isu tersebut dijadikan analisis untuk mendapatkan hasil berupa rekomendasi program dan kegiatan yang nantinya dipertahankan untuk dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Paser.
- Isu Penguatan Good and Smart Government Isu strategis Good and Smart Government memiliki keterkaitan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebanyak 16 indikator. Indikator yang memiliki keterkaitan dengan isu tersebut dijadikan analisis untuk mendapatkan hasil berupa rekomendasi program dan kegiatan yang nantinya dipertahankan untuk dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Paser.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen

perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 mengacu pada RPJMD tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026,

Tujuan yang digunakan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025 s/d 2029 ada 1 (satu) dan 2 (dua) Sasaran yaitu :

TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
		Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Daerah dan Efektivitas Program Pembangunan yang Didukung oleh Peningkatan Kolaborasi Antar-OPD dan Sinergi Lintas Sektor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persepsi dan Ekspektasi Terhadap Hasil Pembangunan	81	81,2	81,4	81,6	81,8
Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat daerah	Nilai Kinerja Sekretariat Daerah	62,76	64,33	65,64	67,58	69,27
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	2,78	2,99	3,21	3,43	3,65

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 serta Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Paser. Secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan dan sasaran.
3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan fisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai melaksanakan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2027 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2027 adalah sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan, dan 60 (enam puluh) sub Kegiatan;

2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebesar Rp 107.574.317.959,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian:

Adapun rencana Program dan Kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel TC.33 sebagai berikut

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

Tabel TC. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028 KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun N (2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun N + 1 (2028)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH				107.574.317.959				109.064.956.480
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				107.574.317.959	APBD			
4.01.01.2	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Nilai Kinerja Manajemen Internal	Paser	80	82.030.279.177	APBD		84	83.166.958.417
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Paser						
4.01.01.2.01	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	Paser	88 85	1.129.512.164	APBD		90 90	1.129.512.164
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Paser						
4.01.01.2.02	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan	Persentase temuan ditindaklanjuti Persentase LHP nihil	Paser	88 25	45.444.081.178	APBD		91 30	45.444.081.178
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Paser						
4.01.01.2.05	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	Paser	92	776.000.000	APBD		94	776.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Paser						
4.01.01.2.06	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Paser	88	10.928.809.046	APBD		90	10.928.809.046
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Paser						
4.01.01.2.08	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	Paser	88	8.315.867.420	APBD		90	9.452.546.660
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Paser						
4.01.01.2.09	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Paser	78	4.352.274.200	APBD		82	4.352.274.200
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Paser						
4.01.01.2.11	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	Paser	92	2.321.936.000	APBD		94	2.321.936.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Paser						

Rancangan Renja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.01.2.12	Tersedianya layanan dukungan operasional dan fasilitas rumah tangga yang efektif, efisien, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	87	3.049.477.000	APBD		89	3.049.477.000
	Penataan Organisasi		Paser						
4.01.01.2.13	Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	Paser	100	1.419.217.839	APBD		100	1.419.217.839
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Paser						
4.01.01.2.14	Terselenggaranya layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, tepat waktu, dan mendukung kelancaran tugas serta citra pimpinan daerah	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana	Paser	88	4.293.104.330	APBD		90	4.293.104.330
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Paser						
4.01.02.2	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Paser	51,91	20.650.365.651,00			52,95	20.936.514.158,00
	Administrasi Tata Pemerintahan		Paser						
4.01.02.2.01	Meningkatnya Kinerja layanan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Paser	100	1.862.310.191,00	APBD		100	1.862.310.191,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Paser						
4.01.02.2.02	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	Paser	85	17.438.176.382,00	APBD		90	17.724.324.889,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Paser						
4.01.02.2.03	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi hukum yang efektif dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah daerah	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	Paser	88	911.369.609,00	APBD		90	911.369.609,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Paser						
4.01.02.2.04	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Paser	54	438.509.469	APBD		54	438.509.469
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Paser						
4.01.03.2.	Meningkatnya tatakelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan	Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan	Paser	21,4	4.893.673.131,00			22,9	4.961.483.905,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Paser						
4.01.03.2.01	Terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana.	Paser	88	935.184.914,00	APBD		90	935.184.914,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Paser						
4.01.03.2.02	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat waktu dan terintegrasi	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	Paser	100	701.208.099,00	APBD		100	701.208.099,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Paser						
4.01.03.2.03	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Paser	75	2.528.816.625,00	APBD		80	2.596.627.398,00
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Paser	6				6,5	
		Tingkat Kematangan UKPBJ	Paser	42				44	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Paser						
4.01.03.2.04	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun	Paser	3	728.463.493,00	APBD		3	728.463.494,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3 Program Perekonomian dan Pembangunan

2. KEGIATAN

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 8 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- 9 Penataan Organisasi
- 10 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 11 Administrasi Tata Pemerintahan
- 12 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- 13 Fasilitas dan Koordinasi Hukum
- 14 Fasilitas Kerjasama Daerah
- 15 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- 16 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- 17 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

18 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

3. SUB KEGIATAN

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
- 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 11 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- 14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 17 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 18 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 22 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- 23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 24 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 28 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 29 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah
- 30 Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 31 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 32 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- 33 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- 34 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 35 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- 36 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 37 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 38 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 39 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 40 Fasilitasi Keprotokolan
- 41 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- 42 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 43 Penataan Administrasi Pemerintahan
- 44 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- 45 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 46 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- 47 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
- 48 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
- 49 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 50 Fasilitasi Bantuan Hukum
- 51 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- 52 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
- 53 Evaluasi Kerjasama
- 54 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- 55 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 55 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- 56 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

- 57 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- 58 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- 59 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- 60 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- 61 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 62 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 63 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2027, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 107.574.317.959,-(Seratus tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) untuk pembiayaan 3 (tiga) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Renja awal Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Renja awal Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027;
2. Dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Paser;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 untuk setiap triwulannya;

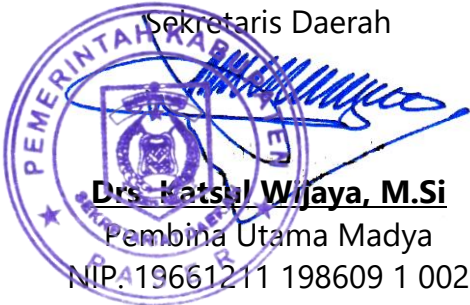
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2027 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Paser.

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2027.

Tana Paser, 2025

Sekretaris Daerah



Drs. Katsul Wijaya, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661211 198609 1 002